

Historiografi Kolonial dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Kajian Konseptual

Colonial Historiography and Indonesian Nationalism: A Conceptual Review

Ahmad G. Dohamid¹

¹Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan RI

email: ahmaddohamid@gmail.com

Abstract

This article examines colonial historiography and its relation to the development of nationalist narratives in Indonesia. It is a conceptual study based on secondary literature, aimed at critically assessing colonial biases in historical writing and proposing a new conceptual framework for understanding Indonesian historiography. Dutch colonialism, which lasted for more than three centuries, produced a historiographical tradition that positioned indigenous society as an object rather than a subject of history. Conversely, nationalist historiography that emerged after independence often emphasized the glorification of the national struggle, thereby limiting space for diverse local narratives. This review traces the development of colonial, nationalist, and contemporary historiography, and analyzes their implications for understanding Indonesian nationalism. The findings indicate that colonial historiography was eurocentric, while nationalist historiography tended to be hegemonic. Therefore, a new conceptual framework is required, one that integrates postcolonial approaches and local history to construct a more inclusive and reflective narrative. The article concludes that the future of Indonesian historiography should be directed toward narrative plurality, the integration of local sources, and the deconstruction of both colonial and nationalist biases.

Keywords: *historiography, colonialism, nationalism, Indonesia, conceptual review*

Abstrak

Artikel ini membahas historiografi kolonial dan kaitannya dengan perkembangan narasi nasionalisme Indonesia. Kajian ini bersifat konseptual dan berbasis pada literatur sekunder, dengan tujuan mengkritisi bias kolonial dalam penulisan sejarah serta menawarkan kerangka konseptual baru dalam membaca historiografi Indonesia. Dalam penulisan sejarah Indonesia, kolonialisme Belanda selama lebih dari tiga abad melahirkan tradisi historiografi yang menempatkan masyarakat pribumi sebagai objek, bukan subjek sejarah. Sebaliknya, historiografi nasionalis yang berkembang setelah kemerdekaan sering menekankan glorifikasi perjuangan bangsa sehingga kurang memberi ruang bagi keragaman narasi lokal. Kajian ini meninjau perkembangan historiografi kolonial, nasionalis, dan kontemporer, lalu menganalisis

implikasinya terhadap pemahaman nasionalisme Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa historiografi kolonial bersifat eurocentris, sementara historiografi nasionalis cenderung hegemonik. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka konseptual baru berbasis pendekatan poskolonial dan sejarah lokal untuk membangun narasi yang lebih inklusif dan reflektif. Artikel ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa masa depan historiografi Indonesia sebaiknya diarahkan pada pluralitas narasi, integrasi sumber lokal, dan dekonstruksi bias kolonial maupun nasionalis.

Kata kunci: historiografi, kolonialisme, nasionalisme, Indonesia, kajian konseptual.

Pendahuluan

Historiografi memiliki peran fundamental dalam pembentukan identitas bangsa. Sejarah bukanlah sekadar catatan peristiwa yang telah terjadi, melainkan juga arena perdebatan, kontestasi, dan konstruksi makna yang terus berlangsung. Bagi bangsa Indonesia, penulisan sejarah menjadi medan pertarungan antara berbagai kekuatan: kolonial, nasionalis, dan masyarakat lokal. Setiap rezim pengetahuan membawa narasi dan agenda ideologisnya sendiri, sehingga memahami historiografi berarti juga menelaah relasi kuasa yang melingkupinya.

Selama lebih dari tiga abad, Belanda menuliskan sejarah Indonesia melalui arsip-arsip resmi, laporan administrasi, catatan perjalanan, serta karya akademik yang ditulis oleh pejabat maupun sarjana kolonial. Tradisi ini menempatkan bangsa Indonesia sebagai objek yang diamati, bukan sebagai subjek yang memiliki agensi dalam membangun narasi sendiri. Para penulis kolonial seperti J. C. Baud atau H. Colijn, misalnya, menekankan peran “misi peradaban” Belanda di Hindia Timur dengan menggambarkan rakyat pribumi sebagai masyarakat yang perlu diarahkan menuju modernitas (Baud, 1848). Narasi semacam ini merupakan cerminan eurocentrism, yakni kecenderungan memandang sejarah dari sudut kepentingan Eropa dan menempatkan bangsa terjajah hanya sebagai latar dari kisah kolonial.

Seiring dengan menguatnya gerakan nasionalisme pada awal abad ke-20, muncullah kesadaran untuk menulis sejarah Indonesia dari perspektif bangsa sendiri. Historiografi nasionalis lahir dari semangat mengoreksi bias kolonial. Tokoh-tokoh

pergerakan seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Takdir Alisjahbana menekankan pentingnya menulis sejarah perjuangan bangsa sebagai sarana membangun kesadaran kebangsaan (Hatta, 1979; Soekarno, 1930). Setelah kemerdekaan, narasi ini diperkuat melalui karya-karya sejarawan Indonesia seperti Sartono Kartodirdjo yang menekankan dimensi sosial dalam sejarah pemberontakan rakyat, serta Nugroho Notosusanto yang menulis *Sejarah Nasional Indonesia* dengan penekanan pada heroisme tokoh bangsa dan legitimasi perjuangan kemerdekaan (Kartodirdjo, 1984; Notosusanto, 1975).

Namun demikian, historiografi nasionalis juga tidak bebas dari keterbatasan. Pertama, narasi nasionalis sering kali mengedepankan tokoh-tokoh besar dan elite politik, sehingga pengalaman rakyat biasa atau kelompok marginal sering terpinggirkan. Kedua, sejarah nasionalis kerap terjebak dalam glorifikasi perjuangan, sehingga mengabaikan kompleksitas sosial, budaya, dan lokalitas. Ketiga, dalam praktik politik, historiografi nasionalis kadang dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan, sebagaimana terlihat pada masa Orde Baru ketika sejarah resmi digunakan untuk menjustifikasi stabilitas politik dan pembangunan nasional (Heryanto, 1985).

Pertentangan antara historiografi kolonial dan nasionalis melahirkan pertanyaan penting dalam studi sejarah Indonesia: bagaimana sebaiknya sejarah ditulis agar lebih inklusif, reflektif, dan terbebas dari bias ideologis? Pertanyaan ini tidak hanya bersifat metodologis, melainkan juga filosofis. Sebagaimana dikatakan oleh Reinhart Koselleck, konsep-konsep historis selalu lahir dari konteks sosial-politik tertentu dan memiliki muatan ideologis yang melekat (Koselleck, 2004). Dengan demikian, penulisan sejarah Indonesia selalu terikat dengan proyek politik yang lebih luas, baik kolonialisme maupun nasionalisme.

Dalam konteks ini, pendekatan poskolonial menawarkan jalan keluar konseptual. Edward Said melalui karyanya *Orientalism* menegaskan bahwa kolonialisme tidak hanya berlangsung secara politik dan ekonomi, tetapi juga melalui

produksi pengetahuan yang menempatkan Timur sebagai “yang lain” (Said, 1978). Homi Bhabha menambahkan dengan konsep hibriditas, bahwa identitas pascakolonial selalu terbentuk melalui negosiasi antara dominasi dan resistensi (Bhabha, 1994). Dengan menggunakan kerangka poskolonial, historiografi Indonesia dapat dikritisi bukan hanya karena bias kolonial, tetapi juga karena kecenderungan hegemonik nasionalis yang menutup kemungkinan munculnya narasi alternatif.

Artikel ini penting karena menyentuh dimensi epistemologis, filosofis, dan metodologis dalam studi sejarah. Historiografi bukan sekadar menyusun kronologi fakta, melainkan juga proses membangun makna. E. H. Carr dengan tegas menyatakan bahwa sejarah adalah “dialog tanpa akhir antara masa lalu dan masa kini” (Carr, 1961, p. 30), yang berarti setiap penulisan sejarah merefleksikan kepentingan masa kini dalam membaca masa lalu. Maka, bagaimana bangsa Indonesia memahami kolonialisme dan nasionalisme melalui penulisan sejarah akan menentukan cara pandang terhadap identitas kebangsaan, legitimasi politik, serta arah pembangunan di masa depan.

Lebih jauh, perdebatan historiografi Indonesia juga terkait dengan isu pluralitas identitas. Nasionalisme Indonesia sering dipahami sebagai narasi tunggal yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme, padahal pada kenyataannya pengalaman sejarah bangsa ini sangat beragam. Dari Aceh hingga Papua, terdapat beragam bentuk resistensi, adaptasi, dan negosiasi terhadap kolonialisme yang tidak selalu sejalan dengan narasi nasionalis arus utama. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan kembali sejarah lokal, tradisi lisan, dan memori komunitas dalam penulisan sejarah Indonesia. Hal ini sejalan dengan gagasan Taufik Abdullah tentang perlunya “sejarah yang lebih ramah terhadap masyarakat,” yakni sejarah yang membuka ruang bagi pengalaman sosial sehari-hari, bukan hanya narasi besar politik dan militer (Abdullah, 2010).

Dengan demikian, artikel ini bertujuan meninjau literatur mengenai historiografi kolonial dan nasionalis, mengidentifikasi kelemahan keduanya, serta

menawarkan kerangka konseptual berbasis poskolonial dan sejarah lokal sebagai jalan keluar. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya merekonstruksi historiografi Indonesia yang lebih plural, kritis, dan reflektif.

Kerangka Teoretis dan Metodologis

Historiografi sebagai Konsep

Historiografi merupakan kajian yang tidak hanya berfokus pada peristiwa sejarah, melainkan juga pada cara sejarah ditulis, ditafsirkan, dan digunakan. Menurut Gottschalk (1957), historiografi adalah rekonstruksi masa lalu berdasarkan bukti yang tersedia dan diinterpretasikan melalui metodologi tertentu. Sejarawan, dengan demikian, tidak sekadar menyusun fakta, tetapi juga memilih, menafsirkan, dan menyusun narasi sesuai dengan perspektif serta kerangka konseptual yang digunakannya. Carr (1961) menegaskan bahwa “sejarah adalah dialog tanpa akhir antara masa lalu dan masa kini,” yang berarti setiap penulisan sejarah selalu merefleksikan kepentingan zamannya.

Dalam konteks Indonesia, historiografi memiliki lapisan yang kompleks. Pertama, pengaruh kolonialisme Belanda selama lebih dari tiga abad melahirkan tradisi historiografi kolonial yang eurocentris, menempatkan masyarakat pribumi sebagai objek yang diamati (Baud, 1848). Kedua, seiring berkembangnya nasionalisme, muncul historiografi nasionalis yang berusaha membalik narasi kolonial dengan menekankan perlawanan, perjuangan tokoh bangsa, dan identitas nasional (Kartodirdjo, 1984; Notosusanto, 1975). Ketiga, perkembangan ilmu sosial modern membawa metodologi baru, termasuk sejarah sosial, sejarah lokal, hingga pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan antropologi, sosiologi, dan ilmu politik dalam studi sejarah (Abdullah, 2010).

Teori Poskolonial

Kajian poskolonial menyediakan kerangka konseptual yang sangat relevan untuk membaca historiografi kolonial maupun nasionalis. Said (1978), dalam *Orientalism*, menguraikan bagaimana kolonialisme tidak hanya beroperasi secara politik dan ekonomi, tetapi juga melalui konstruksi pengetahuan. Timur, termasuk Indonesia, diposisikan sebagai “yang lain” (the Other) dalam kerangka wacana Barat. Melalui produksi teks, arsip, dan studi akademik, Barat membentuk citra dunia Timur sebagai masyarakat yang terbelakang dan membutuhkan intervensi kolonial.

Bhabha (1994) memperluas kerangka ini dengan konsep hibriditas, yakni kondisi ketika identitas pascakolonial terbentuk dalam ruang negosiasi antara dominasi kolonial dan resistensi lokal. Identitas tidak sepenuhnya ditentukan oleh kolonialisme, tetapi juga tidak sepenuhnya otonom; ia selalu dinegosiasikan. Dalam konteks historiografi Indonesia, kerangka ini membantu untuk memahami bagaimana penulisan sejarah tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan kolonial, nasionalis, dan lokal.

Teori poskolonial memungkinkan kita melihat bahwa narasi sejarah kolonial tidak netral, melainkan sarat kepentingan. Demikian pula, historiografi nasionalis meski lahir sebagai upaya perlawanan, tidak jarang mengulang pola hegemonik dengan mengesampingkan kelompok marginal dan narasi lokal. Dengan demikian, kritik poskolonial berfungsi ganda: pertama, untuk mendekonstruksi bias kolonial; kedua, untuk mengkritisi keterbatasan historiografi nasionalis yang terlalu mengutamakan narasi negara.

Sejarah Konseptual

Selain pendekatan poskolonial, kerangka sejarah konseptual yang dikembangkan Koselleck (2004) juga penting. Menurut Koselleck, konsep-konsep kunci dalam kehidupan politik dan sosial, seperti “kolonialisme” atau

“nasionalisme,” tidak bersifat statis. Mereka memiliki sejarah internal yang dinamis dan berubah seiring perubahan konteks sosial, politik, dan budaya. Konsep adalah instrumen untuk memahami realitas, tetapi sekaligus produk dari realitas sosial tertentu.

Pendekatan ini memberikan dasar untuk melihat nasionalisme Indonesia bukan sekadar sebagai gerakan politik melawan kolonialisme, melainkan sebagai konstruksi konseptual yang mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Nasionalisme pada era pergerakan awal, misalnya, berbeda maknanya dengan nasionalisme pascakemerdekaan atau era Reformasi. Dengan membaca historiografi melalui kacamata sejarah konseptual, kita dapat melihat bagaimana istilah dan ide besar tidak hanya digunakan, tetapi juga dibentuk dalam proses sejarah.

Metode Kajian

Kajian ini bersifat konseptual dan berbasis pada tinjauan literatur (*literature review*). Tidak ada pengumpulan data empiris secara langsung; sumber utama yang digunakan adalah karya-karya historiografi kolonial, seperti arsip VOC, karya sejarawan Belanda abad ke-19 dan ke-20, serta laporan administrasi kolonial (Baud, 1848). Sumber lain adalah karya-karya historiografi nasionalis yang ditulis oleh sejarawan Indonesia, seperti Sartono Kartodirdjo dengan penekanannya pada sejarah sosial, Nugroho Notosusanto dengan narasi perjuangan nasional, dan Taufik Abdullah dengan kritik terhadap sejarah elit dan seruan untuk menghadirkan sejarah rakyat (Kartodirdjo, 1984; Notosusanto, 1975; Abdullah, 2010).

Selain itu, literatur teori poskolonial (Said, 1978; Bhabha, 1994) dan sejarah konseptual (Koselleck, 2004) digunakan sebagai kerangka analitis. Analisis dilakukan dengan cara meninjau bagaimana narasi kolonial dan nasionalis dibangun, mengidentifikasi bias atau keterbatasannya, lalu menawarkan kerangka alternatif yang lebih inklusif. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam artikel ini adalah *analisis konseptual kritis*, yakni menganalisis literatur untuk membangun kerangka teoretis baru yang dapat diaplikasikan dalam studi historiografi Indonesia.

Tinjauan Literatur

1. Historiografi Kolonial

Historiografi kolonial merupakan tradisi penulisan sejarah yang berkembang pada masa pemerintahan Belanda di Hindia Timur sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Tradisi ini terutama didorong oleh kebutuhan administrasi kolonial untuk memahami wilayah jajahan serta menjustifikasi legitimasi kekuasaan. Arsip-arsip VOC, laporan pejabat kolonial, dan karya akademik sarjana Belanda menjadi sumber utama.

Karya awal seperti milik J. C. Baud (*Over den toestand der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen*, 1848) menunjukkan pola umum penulisan sejarah kolonial, yakni menempatkan Belanda sebagai agen modernisasi, sementara masyarakat pribumi digambarkan sebagai statis, terbelakang, dan membutuhkan bimbingan (Baud, 1848). Narasi ini sejalan dengan semangat eurocentrism, di mana pusat sejarah adalah Eropa, dan bangsa terjajah menjadi sekadar objek kajian.

Sejarawan kolonial seperti H. Colijn dan C. Th. van Deventer menulis dengan sudut pandang yang menekankan peran Belanda dalam membawa “politik etis” atau *ethical policy* ke Hindia Belanda (Locher-Scholten, 2003). Walaupun terdapat klaim humanisme, historiografi kolonial pada dasarnya tetap berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan, menutup ruang bagi agensi rakyat, dan memposisikan Indonesia dalam kerangka inferioritas kultural.

Karakteristik historiografi kolonial antara lain:

1. Administratif-fungsional – ditulis untuk kepentingan pemerintah kolonial, bukan untuk kepentingan akademik murni.
2. Eurocentris – mengabaikan perspektif masyarakat lokal dan menjadikan kolonial sebagai pusat narasi.
3. Objektivikasi pribumi – masyarakat Indonesia dilihat sebagai kelompok data statistik atau etnografis, bukan subjek sejarah.

Historiografi kolonial, dengan demikian, bukan sekadar refleksi pengetahuan ilmiah, tetapi juga instrumen kekuasaan. Said (1978) menyebut fenomena ini sebagai “orientalisme,” yaitu bagaimana Barat menciptakan citra Timur untuk menguasainya secara epistemologis.

2. Historiografi Nasionalis

Historiografi nasionalis berkembang seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan pada awal abad ke-20. Nasionalisme sebagai gerakan politik menuntut kemerdekaan, dan dalam ranah historiografi, ia menuntut narasi alternatif yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah.

Soekarno (1930) dalam *Indonesia Menggugat* menegaskan pentingnya melihat sejarah bangsa dari perspektif perjuangan rakyat, bukan dari kaca mata kolonial. Mohammad Hatta (1979) dalam otobiografinya juga menekankan dimensi kesadaran politik rakyat sebagai motor kebangsaan. Setelah kemerdekaan, semangat ini diformalkan melalui penyusunan *Sejarah Nasional Indonesia* oleh Nugroho Notosusanto pada tahun 1970-an. Karya ini menjadi standar narasi sejarah resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah (Notosusanto, 1975).

Historiografi nasionalis memiliki karakteristik:

1. Heroisme tokoh besar – menekankan peran pahlawan nasional, seperti Diponegoro, Pattimura, atau Soekarno.
2. Narasi perlawanan – kolonialisme digambarkan sebagai musuh, sementara rakyat bersatu dalam perlawanan.
3. Fungsi ideologis – digunakan untuk memperkuat legitimasi negara dan membangun identitas kebangsaan.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, fokus pada tokoh besar sering kali menyingkirkan sejarah rakyat biasa, perempuan, atau kelompok minoritas. Kedua, narasi yang terlampau hegemonik berisiko mengabaikan pluralitas pengalaman sejarah di Nusantara. Ketiga, pada masa Orde Baru, historiografi nasionalis

dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menjustifikasi kekuasaan. Heryanto (1985) menekankan bagaimana ideologi negara memengaruhi penulisan sejarah, sehingga sejarah menjadi sarana indoktrinasi, bukan refleksi ilmiah.

Meski demikian, sumbangan historiografi nasionalis tidak bisa diabaikan. Ia berhasil menumbuhkan kesadaran kebangsaan, memperkuat identitas nasional, dan membalik dominasi kolonial dalam penulisan sejarah. Namun, sebagai tradisi, ia tetap perlu dikritisi agar lebih terbuka terhadap narasi alternatif.

3. Historiografi Kontemporer

Sejak 1980-an, muncul historiografi kontemporer yang mencoba keluar dari dikotomi kolonial versus nasionalis. Sejarawan seperti Sartono Kartodirdjo memperkenalkan pendekatan sejarah sosial, yang menempatkan rakyat sebagai aktor penting dalam dinamika sejarah (Kartodirdjo, 1984). Taufik Abdullah mendorong lahirnya sejarah lokal, yang memberi ruang pada pengalaman masyarakat desa dan kelompok subaltern (Abdullah, 2010).

Dalam kajian internasional, Ricklefs (2001) melalui *A History of Modern Indonesia since c. 1200* menawarkan narasi yang lebih seimbang, dengan mengintegrasikan perspektif kolonial, nasionalis, dan lokal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak bisa dipahami secara tunggal, melainkan harus dilihat dalam keragaman pengalaman.

Historiografi kontemporer juga dipengaruhi oleh perkembangan teori poskolonial dan sejarah konseptual. Said (1978) menginspirasi kritik terhadap bias kolonial dalam arsip sejarah, sementara Koselleck (2004) memberikan kerangka untuk memahami bagaimana konsep-konsep besar seperti “nasionalisme” berubah maknanya dari waktu ke waktu.

Karakteristik historiografi kontemporer antara lain:

1. Interdisipliner – memanfaatkan teori dan metode dari antropologi, sosiologi, hingga ilmu politik.

2. Dekonstruktif – mengkritisi narasi hegemonik, baik kolonial maupun nasionalis.
3. Inklusif – memberi ruang bagi sejarah rakyat biasa, lokalitas, dan kelompok marjinal.

Dengan demikian, historiografi kontemporer mencoba menjembatani kelemahan tradisi sebelumnya, sekaligus membuka jalan bagi penulisan sejarah yang lebih plural.

Analisis

Historiografi kolonial dan nasionalis, meskipun berbeda orientasi, memiliki kelemahan konseptual yang serupa: keduanya cenderung merepresentasikan narasi hegemonik yang menutup ruang bagi suara alternatif. Historiografi kolonial menyingkirkan agensi pribumi dengan menempatkan masyarakat Indonesia hanya sebagai objek dalam kerangka administrasi kolonial. Identitas bangsa dijelaskan melalui kategori-kategori etnografis yang diciptakan untuk kepentingan penguasaan politik dan ekonomi (Said, 1978). Sebaliknya, historiografi nasionalis berusaha membalik dominasi kolonial dengan menjadikan bangsa Indonesia sebagai subjek sejarah. Namun, dalam praktiknya, ia sering memonopoli makna sejarah untuk kepentingan politik negara, misalnya melalui glorifikasi tokoh besar dan narasi perjuangan resmi yang didominasi negara (Heryanto, 1985; Notosusanto, 1975).

Kedua tradisi ini sama-sama menyisihkan ruang bagi sejarah lokal, masyarakat biasa, dan kelompok marginal. Dalam perspektif konseptual, hal tersebut merupakan gejala “narasi hegemonik,” yakni konstruksi historis yang mengutamakan kepentingan elite (baik kolonial maupun nasional) dibanding pluralitas pengalaman rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka baru yang mampu mendekonstruksi bias kolonial sekaligus menata ulang keterbatasan narasi nasionalis.

Kerangka yang ditawarkan adalah Historiografi Kritis-Poskolonial. Model ini memiliki empat ciri utama. Pertama, dekonstruksi narasi kolonial, dengan

menyingkap bias eurocentris serta menelusuri bagaimana kolonialisme membentuk wacana tentang Indonesia. Kritik poskolonial memungkinkan kita melihat bahwa arsip kolonial bukanlah catatan netral, melainkan produk kekuasaan (Stoler, 2009).

Kedua, revisi narasi nasionalis, dengan cara mengkritisi kecenderungan glorifikasi tokoh besar dan membuka ruang bagi pengalaman rakyat biasa. Hal ini sejalan dengan upaya sejarawan sosial seperti Kartodirdjo (1984) yang menekankan pentingnya memahami pemberontakan rakyat sebagai fenomena sosial, bukan sekadar heroisme individu.

Ketiga, integrasi sejarah lokal, yakni mengangkat tradisi lisan, arsip desa, dan memori komunitas sebagai sumber sejarah yang sah. Abdullah (2010) menekankan perlunya sejarah yang lebih ramah terhadap masyarakat, karena memori kolektif lokal dapat memperkaya narasi besar nasional dan menantang homogenisasi identitas.

Keempat, pluralitas identitas, yaitu melihat nasionalisme bukan sebagai konstruksi tunggal, tetapi sebagai hasil negosiasi berbagai komunitas. Konsep hibriditas Bhabha (1994) membantu menjelaskan bahwa identitas pascakolonial selalu terbentuk melalui proses percampuran dan negosiasi. Dengan demikian, nasionalisme Indonesia dapat dipahami sebagai mosaik yang terdiri dari berbagai identitas kultural, regional, dan sosial.

Dengan kerangka ini, historiografi Indonesia dapat bergerak dari narasi hegemonik menuju narasi plural yang lebih inklusif. Sejarah tidak lagi hanya menjadi milik kolonial atau negara, tetapi menjadi ruang dialog bagi berbagai kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Pada akhirnya, historiografi kritis-poskolonial berfungsi untuk membebaskan sejarah dari belenggu ideologi dominan, sekaligus menghadirkan narasi yang lebih adil dan representatif bagi bangsa Indonesia.

Kesimpulan dan Implikasi

Historiografi kolonial dan nasionalis merupakan dua tradisi utama dalam penulisan sejarah Indonesia. Keduanya memiliki kontribusi penting, namun tidak

bebas dari bias. Historiografi kolonial menegaskan narasi yang eurocentris, menempatkan bangsa Indonesia sebagai objek dalam kerangka legitimasi kolonial (Said, 1978). Sementara itu, historiografi nasionalis berperan besar dalam membangun identitas kebangsaan, tetapi sering jatuh pada homogenisasi narasi dan glorifikasi tokoh besar, sehingga menyingkirkan kompleksitas pengalaman rakyat (Heryanto, 1985; Notosusanto, 1975).

Kajian ini menawarkan Historiografi Kritis-Poskolonial sebagai kerangka konseptual baru. Pendekatan ini menekankan empat hal: dekonstruksi bias kolonial, revisi narasi nasionalis, integrasi sejarah lokal, dan pengakuan pluralitas identitas (Bhabha, 1994; Abdullah, 2010). Dengan pendekatan ini, historiografi Indonesia dapat ditulis secara lebih plural, inklusif, dan reflektif, serta membuka ruang bagi pengalaman kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Implikasi akademisnya adalah perlunya memperkuat kajian poskolonial dalam studi sejarah Indonesia, dengan mendorong riset berbasis arsip lokal, tradisi lisan, dan memori komunitas. Implikasi praktisnya, penulisan sejarah yang lebih plural dapat memperkaya pendidikan sejarah di sekolah dan perguruan tinggi, serta memperkuat kesadaran kebangsaan yang tidak hanya berbasis pada narasi elite, tetapi juga pada keberagaman pengalaman rakyat. Dengan demikian, sejarah tidak lagi dimonopoli oleh kolonial maupun negara, tetapi menjadi milik bersama seluruh bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (2010). *Sejarah lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Baud, J. C. (1848). *Over den toestand der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen*. Leiden: Hazenberg.
- Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. London: Routledge.
- Carr, E. H. (1961). *What is history?* London: Penguin.



- Gottschalk, L. (1957). *Understanding history: A primer of historical method*. New York: Alfred A. Knopf.
- Hatta, M. (1979). *Untuk negeriku: Sebuah otobiografi*. Jakarta: UI Press.
- Heryanto, A. (1985). *State ideology and power in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Koselleck, R. (2004). *Futures past: On the semantics of historical time*. New York: Columbia University Press.
- Locher-Scholten, E. (2003). *Ethiek in fragmenten: Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel, 1877–1942*. Utrecht: Uitgeverij Van Arkel.
- Notosusanto, N. (1975). *Sejarah nasional Indonesia* (Vols. I–VI). Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Stanford: Stanford University Press.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. New York: Vintage.
- Soekarno. (1930). *Indonesia menggugat*. Jakarta: Panitia Penerbitan.
- Stoler, A. L. (2009). *Along the archival grain: Epistemic anxieties and colonial common sense*. Princeton: Princeton University Press.